

ANALYSIS OF POWER RELATIONS IN THE FLOOD CRISIS IN WEST KALIMANTAN

Sarina¹, Tri Djoko Surono², Fatmawati³, Dahniar Th. Musa⁴, Syarifah Ema Rahmaniah⁵

Master of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University,
Pontianak

Email: sahabat.super47@gmail.com^{1*}

Abstract

Flooding in West Kalimantan has become a recurring socio-ecological crisis affecting communities living along riverbanks, coastal areas, and urban settlements. This study aims to analyze the flood crisis through Michel Foucault's perspective on power relations by examining how power operates in environmental governance, the production of disaster knowledge, and the formation of community responses to environmental vulnerability. The study employs a qualitative approach drawing on environmental sociology and Foucauldian analysis. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and a literature review involving flood-affected residents in several districts in West Kalimantan. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that flooding in West Kalimantan is not merely a hydrometeorological event but is also closely related to power relations in land-use management, development policies, and environmental governance. More specifically, the study identifies four main findings. First, power relations operate through ecological spatial governance, contributing to the formation of community vulnerability to flooding. Second, the production of disaster knowledge through formal institutions, such as the Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency (BMKG) and the Regional Disaster Management Agency (BPBD), influences how communities understand and respond to risk, while communities also develop local knowledge based on their experiences with recurrent flooding. Third, repeated experiences of flooding encourage the normalization of risk, whereby flooding is perceived as part of everyday life. Fourth, communities develop adaptive practices through social solidarity and reciprocal cooperation as mechanisms for coping with the impacts of flooding.

Keywords: Power Relations; Flood Crisis; Environmental Governance.

Abstrak

Banjir di Kalimantan Barat telah menjadi krisis sosial-ekologis yang berulang yang memengaruhi masyarakat di tepi sungai, pesisir, dan perkotaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis krisis banjir melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault dengan meneliti bagaimana kekuasaan beroperasi dalam tata kelola lingkungan, produksi pengetahuan bencana, dan pembentukan respons masyarakat terhadap kerentanan lingkungan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sosiologi lingkungan dan analisis Foucauldian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka yang melibatkan warga yang terkena dampak banjir di beberapa distrik di Kalimantan Barat. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banjir di Kalimantan Barat bukan hanya merupakan peristiwa hidrometeorologis, tetapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam pengelolaan tata guna lahan, kebijakan pembangunan, dan tata kelola lingkungan. Secara tegas, penelitian ini mengidentifikasi empat temuan utama. Pertama, relasi kekuasaan beroperasi melalui tata kelola ruang ekologis yang berkontribusi terhadap pembentukan kerentanan masyarakat terhadap banjir. Kedua, produksi pengetahuan bencana melalui lembaga formal, seperti BMKG dan BPBD, memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons risiko, sementara masyarakat juga mengembangkan pengetahuan lokal berdasarkan pengalaman banjir berulang. Ketiga, pengalaman banjir yang berulang mendorong normalisasi risiko, sehingga banjir dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Keempat, masyarakat mengembangkan praktik adaptasi melalui solidaritas sosial dan kerja sama timbal balik sebagai mekanisme untuk menghadapi dampak banjir.

Kata kunci: Relasi Kekuasaan; Krisis Banjir; Tata Kelola Lingkungan.

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan menunjukkan tren peningkatan dalam hal frekuensi, intensitas dampak, dan luas wilayah yang terdampak. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (BPBD), 114 kecamatan dan 559 desa/kecamatan dikategorikan sebagai daerah rawan banjir (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2026; Ertian dkk., 2025). Pada awal tahun 2026, banjir kembali melanda sejumlah daerah seperti Kabupaten Sambas, Sekadau, Melawi, dan Kota Singkawang, menyebabkan ribuan warga terdampak, ratusan rumah terendam, dan mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di Kalimantan Barat bukan lagi sekadar peristiwa alam yang bersifat insidental, tetapi telah berkembang menjadi krisis sosio-ekologis yang berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat (Rabsanjani et al., 2022).

Banjir sering dipahami sebagai konsekuensi dari curah hujan yang tinggi, perubahan iklim, atau kondisi geografis di daerah rawan banjir (Febblina Daryanes, Irda Sayuti, 2026; Lizar dkk., 2024). Perspektif ini cenderung menempatkan banjir sebagai fenomena alam di luar kendali manusia. Namun, studi bencana modern menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya ditentukan oleh ancaman alam, tetapi juga oleh tingkat kerentanan yang terbentuk melalui kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berkembang di dalam masyarakat (Bigandata dkk., 2023; Muhyi, HA, Nurmandi, A., & Suryanto, 2017; Wijaya & Halim, 2022). Dengan demikian, krisis banjir tidak hanya terkait dengan besarnya curah hujan, tetapi juga terkait dengan bagaimana ruang, sumber daya alam, dan lingkungan dikelola oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2026; Mujib dkk., 2025).

Dalam konteks Kalimantan Barat, peningkatan risiko banjir terkait erat dengan perubahan besar dalam penggunaan lahan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir (Ertian dkk., 2025; Yanti dkk., 2022). Perluasan perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan kawasan permukiman telah mengubah banyak kawasan hutan dan daerah aliran sungai menjadi kawasan produksi ekonomi (Dimas Harya Wisanggeni dkk., 2024; Ocktaviani dkk., 2025). Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya lahan terbuka telah menyebabkan peningkatan limpasan, sedimentasi sungai, dan penurunan kapasitas lingkungan untuk mengendalikan aliran air (Nurhamidah dkk., 2018; Rizki Oktian, Roby Hambali, 2025) . Perubahan ini menunjukkan bahwa krisis banjir tidak hanya dipicu oleh faktor alam tetapi juga merupakan konsekuensi dari pilihan pembangunan yang dibuat dalam sistem sosial dan politik tertentu .

Fenomena ini menunjukkan bahwa banjir perlu dipahami sebagai masalah yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam pengelolaan lingkungan. Perspektif ekologi politik menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan seringkali merupakan akibat dari hubungan yang tidak setara antara kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan, modal, dan sumber daya dengan mereka yang harus menanggung dampak ekologis. Dalam konteks ini, distribusi risiko banjir tidak terjadi secara alami, tetapi dipengaruhi oleh keputusan politik, kebijakan pembangunan, peraturan perencanaan tata ruang, dan praktik pemanfaatan sumber daya alam yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan siapa yang menanggung risiko lingkungan (Bryant, 1997). Perspektif ekologi politik Bryant membantu menjelaskan bagaimana ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan, modal, dan sumber daya dapat menghasilkan distribusi manfaat dan risiko ekologis yang tidak seimbang. Kerangka ini menjadi pelengkap bagi perspektif Michel Foucault yang digunakan dalam penelitian ini. Jika ekologi politik membantu melihat struktur ketimpangan dan kepentingan yang membentuk kerentanan ekologis, perspektif Foucault digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan, regulasi, pengorganisasian ruang, dan praktik sosial dalam membentuk cara risiko dipahami dan dikelola. Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, krisis banjir dapat dipahami tidak hanya sebagai akibat dari ketimpangan dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai hasil dari mekanisme kekuasaan yang membentuk pengetahuan, kebijakan, dan respons masyarakat terhadap risiko.

Hubungan kekuasaan dalam krisis banjir dapat dianalisis melalui perspektif Michel Foucault, yang memandang kekuasaan bukan hanya sebagai instrumen dominasi yang dipegang oleh negara atau kelompok tertentu, tetapi sebagai jaringan hubungan yang beroperasi melalui berbagai praktik sosial, regulasi, dan produksi pengetahuan (Michel Foucault, 1980) . Menurut Foucault, kekuasaan beroperasi melalui mekanisme yang seringkali tidak terlihat, tetapi mampu membentuk bagaimana individu memahami

realitas sosial di sekitar mereka. Dalam konteks bencana, berbagai pengetahuan mengenai daerah rawan banjir, pemetaan risiko, perencanaan tata ruang, dan kebijakan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai informasi yang sepenuhnya netral karena pengetahuan ini juga menentukan bagaimana risiko didefinisikan, dikelola, dan didistribusikan dalam masyarakat. Dalam konteks krisis banjir, berbagai kebijakan seperti penyusunan rencana tata ruang regional, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, relokasi permukiman, dan penetapan status tanggap darurat merupakan bentuk praktik pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan risiko sosial yang disebabkan oleh bencana. Namun, kebijakan-kebijakan ini seringkali lebih berorientasi pada manajemen dampak daripada mengatasi akar penyebab masalah ekologis yang menyebabkan banjir berulang. Akibatnya, banjir cenderung dianggap sebagai kondisi normal yang harus diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, masyarakat lokal di Kalimantan Barat memiliki hubungan historis yang kuat dengan sungai dan hutan sebagai ruang hidup sosial, ekonomi, dan budaya (Sianipar & Lingga, 2025). Bagi masyarakat Melayu dan Dayak, sungai tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai bagian penting dari identitas budaya dan sistem pengetahuan lokal mereka. Namun, modernisasi, pembangunan, dan ekspansi ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah mengubah hubungan ini. Lingkungan, yang sebelumnya dipahami sebagai ruang bersama untuk kehidupan, secara bertahap bergeser menjadi komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk pertumbuhan. Pergeseran ini pada akhirnya meningkatkan kerentanan ekologis masyarakat terhadap berbagai bentuk krisis lingkungan, termasuk banjir.

Beberapa studi tentang banjir di Kalimantan Barat telah dilakukan dengan fokus yang beragam. (Andriyani dkk., 2021). Sebagian besar studi berfokus pada hidrologi, perubahan penggunaan lahan, mitigasi bencana, adaptasi masyarakat, dan pengelolaan daerah aliran sungai (Lizar dkk., 2024; SB Soeryamassoeka, Danang Gunarto, Umar, Fiqih Rahmanto, 2023). Studi lain menyoroti pentingnya kearifan lokal dan konservasi berbasis budaya masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan ekologis kawasan hutan dan sungai (Djumaty & Hayam Dey, 2023; Putri dkk., 2025; Satyaningrum dkk., 2024). Studi-studi ini memberikan kontribusi penting untuk memahami penyebab banjir dan strategi mitigasinya. Namun, studi-studi sebelumnya masih menyisakan ruang yang

cukup besar untuk analisis lebih lanjut. Sebagian besar penelitian masih memandang banjir sebagai masalah teknis, ekologis, atau kelembagaan, sehingga kurang membahas bagaimana hubungan kekuasaan beroperasi untuk menghasilkan kerentanan ekologis, menentukan distribusi risiko banjir, dan membentuk praktik pengelolaan lingkungan yang berkontribusi pada krisis banjir. Namun, seperti yang dijelaskan Foucault (1980), kekuasaan beroperasi melalui pengorganisasian ruang, produksi pengetahuan, dan pembentukan subjek sosial, yang pada akhirnya menentukan bagaimana suatu masalah dipahami dan diatasi. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami krisis banjir sebagai akibat dari relasi kekuasaan yang bekerja dalam tata kelola dan pembangunan lingkungan di Kalimantan Barat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2026) .

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kekuasaan yang berperan dalam krisis banjir di Kalimantan Barat (Prasetyo dkk., 2021; Suryawati dkk., 2011) . Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bentuk-bentuk relasi kekuasaan apa yang beroperasi dalam pengelolaan lingkungan dan ruang sosial yang berkaitan dengan krisis banjir di Kalimantan Barat (Amin, 2024; Priyanka Prajna Paramitha dkk., 2020) . Kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan relasi kekuasaan ini berkontribusi pada peningkatan kerentanan ekologis masyarakat (Nisa Rizqi Ramadhanty, Chatarina Muryani, 2022; Suprianto dkk., 2025) . Ketiga, apa implikasi dari relasi kekuasaan ini terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat yang terdampak banjir.

Penelitian ini berpendapat bahwa krisis banjir di Kalimantan Barat bukan semata-mata akibat faktor hidrometeorologi atau perubahan iklim, melainkan akibat dari relasi kekuasaan yang beroperasi melalui kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, produksi pengetahuan tentang bencana, dan pengaturan ruang ekologis. Relasi kekuasaan ini menentukan bagaimana lingkungan dimanfaatkan, siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan, dan siapa yang menanggung risiko ekologis. Oleh karena itu, analisis relasi kekuasaan dalam krisis banjir sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar penyebab banjir di Kalimantan Barat dan untuk mendorong terwujudnya tata kelola lingkungan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Krisis banjir di Kalimantan Barat dipilih sebagai fokus penelitian ini karena fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan faktor hidrometeorologi tetapi juga berkaitan dengan dimensi tata kelola sosial, politik, dan lingkungan yang memengaruhi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana. Hingga saat ini, studi tentang banjir di Kalimantan Barat lebih berfokus pada aspek teknis dan ekologis, seperti curah hujan, hidrologi, perubahan penggunaan lahan, dan mitigasi bencana. Sementara itu, perhatian terhadap relasi kekuasaan dalam pengelolaan lingkungan, pengalaman masyarakat yang terdampak, dan praktik adaptasi sosial yang muncul dalam menghadapi banjir masih relatif terbatas (Eka Wulan Safriani dkk., 2024; Nugroho, RA, Yuliana, IN, & Wahyuni, 2021) . Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana relasi kekuasaan dalam tata kelola dan pembangunan lingkungan berkontribusi pada kerentanan ekologis masyarakat dan memengaruhi respons sosial terhadap banjir yang berulang (Bryant, 1997) .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hubungan kekuasaan Michel Foucault (Michel Foucault, 1980; Moleong, 2013) . Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kekuasaan beroperasi melalui kebijakan, peraturan, praktik pembangunan, dan produksi pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan bencana. Dari perspektif Foucauldian, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara atau lembaga tertentu, tetapi lebih sebagai jaringan hubungan yang beroperasi melalui berbagai mekanisme sosial, wacana, dan praktik pengaturan yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menanggapi, dan beradaptasi dengan krisis banjir. Perspektif ini banyak digunakan dalam studi lingkungan dan bencana untuk menjelaskan hubungan antara pengetahuan, kebijakan, dan manajemen risiko ekologis.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder (Sugiyono, 2017) . Data primer diperoleh dari wawancara dengan masyarakat yang terdampak banjir mengenai aktivitas sebelum, selama, dan setelah banjir, strategi adaptasi yang digunakan, peran gender dalam rumah tangga, bentuk solidaritas sosial yang telah berkembang di masyarakat, dan persepsi mereka tentang penyebab banjir yang berulang. Pengalaman ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menafsirkan risiko banjir dan bagaimana berbagai kebijakan dan praktik pembangunan memengaruhi kehidupan

mereka. Data sekunder diperoleh dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, dokumen kebijakan pemerintah, dan berbagai jurnal dan literatur yang relevan dengan tema hubungan kekuasaan, bencana, dan tata kelola lingkungan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2026).

Penelitian ini melibatkan sebelas informan dari berbagai daerah yang terdampak banjir di Kalimantan Barat, yaitu Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kubu Raya. Informan tersebut meliputi ibu rumah tangga, petani, guru, pedagang, petugas kesehatan, pegawai negeri sipil, pemilik usaha, dan karyawan sektor swasta. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman langsung mereka dengan banjir dan pengetahuan mereka tentang perubahan lingkungan dan kondisi sosial di daerah tempat tinggal mereka (Ramdhan, 2021; Sugiyono, 2017). Keragaman latar belakang informan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengalaman masyarakat dalam menghadapi krisis banjir dan persepsi mereka tentang berbagai aktor dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan (Moleong, 2013).

Penelitian ini dimulai dengan peninjauan pustaka data sekunder, khususnya laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat tahun 2026, dokumen kebijakan terkait lingkungan dan bencana, serta penelitian sebelumnya tentang banjir dan tata kelola lingkungan. Wawancara semi-terstruktur kemudian dilakukan dengan informan untuk mengeksplorasi pengalaman mereka dalam menghadapi banjir, strategi adaptasi yang mereka kembangkan, pembagian peran sosial dalam keluarga dan masyarakat, bentuk-bentuk solidaritas masyarakat, dan pandangan mereka tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap banjir yang berulang. Lebih lanjut, dokumentasi dan studi kasus digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memahami konteks sosial-ekologis yang mendasari krisis banjir di Kalimantan Barat.

Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles Huberman, yang mencakup tiga tahap: reduksi data, tampilan data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis secara interpretatif melalui tahap penyajian ulang, deskripsi, dan interpretasi (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994). Analisis tersebut berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk relasi kekuasaan yang muncul dalam pengelolaan lingkungan dan bencana,

produksi dan penyebarluasan pengetahuan tentang risiko banjir, praktik adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir, serta bentuk-bentuk perlawanan dan solidaritas sosial sebagai respons terhadap kondisi kerentanan yang mereka hadapi (Michel Foucault, 1980). Dengan demikian, studi ini berupaya menjelaskan bahwa krisis banjir di Kalimantan Barat bukan hanya merupakan masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan dinamika relasi kekuasaan yang bekerja dalam tata kelola lingkungan, pembangunan, dan manajemen risiko bencana.

HASIL PENELITIAN

Manifestasi Krisis Banjir sebagai Realitas Sosio-Ekologis di Kalimantan Barat

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat pada tahun 2026, banjir melanda beberapa daerah seperti Kabupaten Sambas, Sekadau, Melawi, dan Kota Singkawang, dengan jumlah korban mencapai ribuan orang. Di Kabupaten Sambas, banjir mempengaruhi 406 keluarga atau sekitar 1.724 orang, sedangkan di Kabupaten Sekadau, banjir menggenangi Desa Melati, Desa Mongko, dan Desa Lembah Beringin, mempengaruhi lebih dari 1.200 keluarga. Di Kabupaten Melawi, banjir bandang disertai tanah longsor merusak beberapa permukiman dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi peristiwa insidental, tetapi telah menjadi fenomena berulang dan membentuk kehidupan sosial masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Tabel 1. Impacts of Floods in West Kalimantan in 2026

Kabupaten/Kota	Wilayah Terdampak	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Dampak
Sambas	Desa Tempapan Hulu dan Desa Sajingan, Kecamatan Galing	406 rumah tangga	1.724 jiwa	Area permukiman terdampak banjir
Sekadau	Desa Melati	246 rumah tangga	902 jiwa	227 rumah terendam
Sekadau	Desa Mongko, Kecamatan Nanga Taman	537 rumah tangga	1.921 jiwa	227 rumah terendam
Sekadau	Desa Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap	417 rumah tangga	1.382 jiwa	350 rumah terendam
Melawi	Desa Bata Luar, Maris Permai, Bina Jaya, dan Pelita Kenaya (Kecamatan Pinoh)	239 rumah tangga	697 jiwa	Banjir bandang dan tanah longsor
Singkawang	Beberapa wilayah perkotaan	Dalam penilaian	Dalam penilaian	Banjir rob dan genangan perkotaan

]

masyarakat memantau informasi cuaca, mengamankan barang berharga, mempersiapkan logistik, dan membersihkan saluran drainase. Selama banjir, prioritas utama adalah menyelamatkan anggota keluarga, memindahkan barang-barang ke lokasi yang lebih aman, dan mengungsi jika kondisi memburuk. Setelah banjir surut, masyarakat membersihkan rumah mereka dan melanjutkan kegiatan ekonomi keluarga. Pola perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyesuaikan kehidupan sehari-hari mereka dengan kemungkinan terjadinya banjir.

Pengalaman banjir yang berulang telah membentuk persepsi masyarakat tentang risiko. Sebagian besar informan tidak lagi memandang banjir sebagai situasi luar biasa, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus diterima dan dihadapi. Seperti yang dikatakan Uli Auliya Andari:

"Kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, jadi ketika banjir datang dan setelah banjir, kami menghadapinya dengan tenang." (Wawancara dengan UAA, 2026)

Pernyataan ini menunjukkan proses normalisasi risiko, suatu kondisi di mana masyarakat menerima kerentanan sebagai hal yang normal karena hal itu terus-menerus dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif Foucauldian, normalisasi ini merupakan bentuk kekuasaan yang membentuk bagaimana individu memahami realitas sosial dan lingkungan yang mereka hadapi (Foucault, 1980). Dengan demikian, krisis banjir tidak hanya menghasilkan dampak fisik tetapi juga membentuk kesadaran sosial masyarakat tentang risiko dan kerentanan.

Hubungan Kekuasaan, Produksi Pengetahuan tentang Bencana, dan Kerentanan Ekologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang banjir sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekologis dan sosial. Secara ekologis, banjir dikaitkan dengan curah hujan tinggi, luapan sungai, sistem drainase yang buruk, dan banjir pasang surut di daerah pesisir. Namun, sebagian besar informan juga mengaitkan peningkatan frekuensi banjir dengan perubahan penggunaan lahan, berkurangnya luas hutan, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, dan aktivitas ekonomi yang mengubah fungsi ekologis wilayah tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami hubungan antara pembangunan dan peningkatan risiko banjir. Dalam konteks ini, hubungan kekuasaan terlihat jelas dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan ruang dan sumber

daya alam. Kebijakan pembangunan, izin penggunaan lahan, dan pengelolaan daerah aliran sungai pada akhirnya menentukan tingkat kerentanan yang dihadapi masyarakat. Meskipun manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam cenderung dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, risiko ekologis lebih dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir.

Studi ini juga menemukan bahwa informasi bencana memainkan peran penting dalam membentuk tindakan masyarakat sebelum banjir terjadi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka bergantung pada informasi yang diberikan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), media massa, dan pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Dwi Kurniawan Budi:

"Yang kami lakukan sebelum banjir adalah mencari informasi dari BMKG tentang perkiraan waktu musim banjir atau air pasang." (Wawancara dengan DKB, 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang bencana berfungsi sebagai instrumen yang membimbing perilaku masyarakat. Informasi mengenai curah hujan, ketinggian air, dan status peringatan banjir memengaruhi keputusan masyarakat terkait persiapan logistik, keamanan aset, dan evakuasi. Dari perspektif Foucault (1980), situasi ini menggambarkan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan (kekuasaan/pengetahuan), di mana produksi pengetahuan menjadi mekanisme yang digunakan untuk mengatur tindakan individu dan populasi.

Namun, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pengetahuan formal yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah. Studi ini menemukan perkembangan berbagai bentuk pengetahuan lokal yang diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun dalam menangani banjir. Pengetahuan ini meliputi pembuatan tempat penampungan darurat, pembangunan tiang penyangga di dalam rumah, identifikasi lokasi evakuasi yang aman, dan pembentukan jaringan komunikasi antar warga. Seperti yang dijelaskan oleh Hery Suhendra:

"Jika curah hujan meningkat, kami bersiap untuk memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi di dalam rumah dan membangun rak darurat jika permukaan air naik lebih tinggi lagi." (Wawancara dengan HS, 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya objek manajemen risiko, tetapi juga produsen pengetahuan yang aktif. Pengetahuan lokal ini berfungsi sebagai strategi adaptasi dan bentuk perlawanan terhadap keterbatasan kapasitas

perlindungan yang diberikan oleh lembaga formal. Dengan demikian, krisis banjir menunjukkan interaksi antara pengetahuan resmi dan pengetahuan lokal dalam membentuk kapasitas manajemen risiko masyarakat.

Implikasi Hubungan Kekuasaan terhadap Adaptasi Sosial, Solidaritas, dan Transformasi Peran Gender

Penelitian ini menemukan bahwa relasi kekuasaan yang membentuk kerentanan banjir juga memiliki berbagai implikasi sosial bagi kehidupan masyarakat. Salah satu implikasi yang paling menonjol adalah penguatan solidaritas sosial sebagai mekanisme kolektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan perlindungan yang tersedia selama bencana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama timbal balik (gotong royong) menjadi salah satu strategi yang digunakan masyarakat dalam menghadapi banjir, terutama dalam proses evakuasi, pemindahan barang, dan pemulihan pascabencana. Salah satu informan, Hery Suhendra (HS), menjelaskan:

"Kami segera bekerja sama dengan warga lain untuk saling membantu memindahkan barang dan orang ke rumah warga di tempat yang lebih tinggi." (Wawancara dengan HS, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa solidaritas sosial berperan penting dalam membantu masyarakat menghadapi keterbatasan sumber daya selama banjir. Pertolongan antarwarga menjadi bagian dari mekanisme sosial yang berkembang dalam menghadapi situasi darurat, terutama ketika bantuan dari lembaga formal belum tersedia atau belum menjangkau seluruh warga. Kondisi ini memperlihatkan adanya kapasitas kolektif masyarakat dalam menghadapi dampak banjir melalui jaringan sosial yang telah terbentuk di lingkungan mereka.

Implikasi lain yang ditemukan adalah transformasi peran gender selama bencana. Dalam keadaan normal, terdapat pembagian kerja yang relatif jelas antara pria dan wanita. Pria umumnya bertanggung jawab atas pekerjaan fisik seperti evakuasi dan perbaikan rumah, sementara wanita berperan dalam mengelola kebutuhan rumah tangga dan melindungi anggota keluarga. Namun, situasi ini berubah ketika terjadi banjir. Situasi darurat mendorong pria dan wanita untuk berbagi peran sesuai dengan kebutuhan yang muncul di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Hery Suhendra:

"Peran gender tidak banyak diperhatikan karena dalam situasi kritis, perempuan juga membantu membawa barang dan laki-laki juga membantu memasak."

Temuan ini menunjukkan bahwa krisis banjir menciptakan ruang bagi terbentuknya hubungan sosial yang lebih fleksibel dan egaliter. Dalam situasi darurat, kebutuhan untuk menjaga keselamatan kolektif menjadi lebih penting daripada alokasi peran normatif. Dengan demikian, krisis banjir tidak hanya menciptakan kerentanan sosial tetapi juga membuka peluang bagi transformasi hubungan sosial di dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa krisis banjir di Kalimantan Barat merupakan produk dari relasi kekuasaan yang beroperasi melalui pengelolaan ruang ekologis, kebijakan pembangunan, produksi pengetahuan tentang bencana, dan distribusi risiko lingkungan. Relasi kekuasaan ini tidak hanya menentukan tingkat kerentanan masyarakat terhadap banjir, tetapi juga membentuk bagaimana masyarakat memahami risiko, mengembangkan strategi adaptasi, membangun solidaritas sosial, dan terlibat dalam berbagai bentuk negosiasi terkait kondisi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, banjir di Kalimantan Barat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah hidrometeorologi, melainkan sebagai krisis sosial-ekologis yang terkait erat dengan dinamika relasi kekuasaan dalam tata kelola lingkungan dan pembangunan.

Bentuk-Bentuk Hubungan Kekuasaan dalam Krisis Banjir di Kalimantan Barat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam krisis banjir di Kalimantan Barat muncul melalui pengelolaan ruang ekologis, produksi pengetahuan bencana, normalisasi risiko, dan praktik adaptasi sosial di masyarakat. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat pada tahun 2026 menunjukkan bahwa banjir terjadi berulang kali di Sambas, Sekadau, Melawi, dan Singkawang, dengan dampak mencapai ribuan penduduk. Temuan ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi insidental tetapi telah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Yutantri dkk., (2023) yang menjelaskan bahwa banjir di Indonesia semakin menunjukkan karakter krisis sosial-ekologis karena interaksi antara faktor lingkungan dan aktivitas manusia. Hasil serupa juga ditemukan oleh Hudaya dkk., (2023) dan Muthiah Sadidah, (2013) yang menunjukkan bahwa risiko banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan tetapi juga oleh tata kelola spasial yang menentukan tingkat kerentanan masyarakat. Dalam konteks Kalimantan Barat, temuan studi ini menunjukkan bahwa dampak banjir yang berulang telah membentuk gaya hidup masyarakat, yang harus terus beradaptasi dengan risiko-

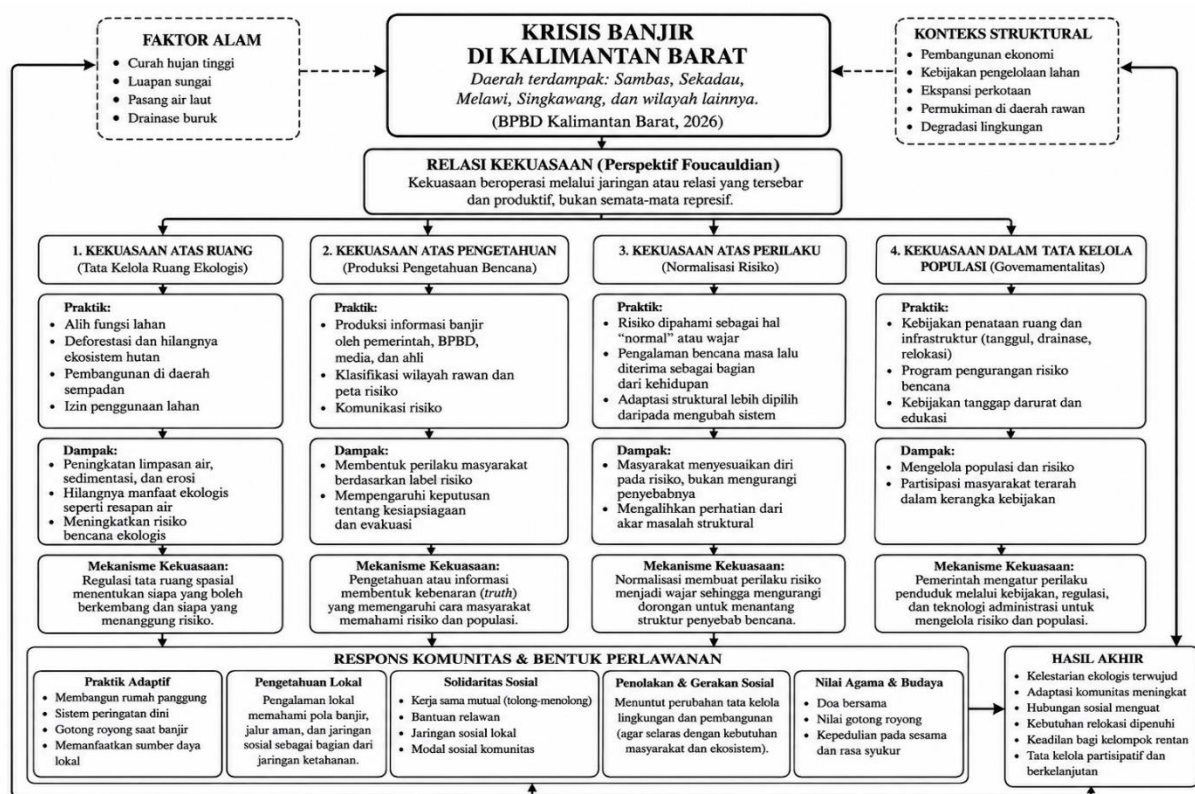
risiko tersebut.

Bentuk pertama dari relasi kekuasaan terlihat dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Sebagian besar informan mengaitkan peningkatan frekuensi banjir dengan perubahan penggunaan lahan, pengurangan luas hutan, pembangunan perumahan, dan penurunan daya dukung lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai penggunaan ruang memiliki konsekuensi langsung terhadap kerentanan masyarakat. Penelitian Yutantri tentang faktor-faktor penyebab banjir menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap banjir. Temuan ini diperkuat oleh Hudaya , yang menjelaskan bahwa perubahan lingkungan dan pembangunan regional berkontribusi pada peningkatan risiko banjir. Lebih lanjut, Sadidah menekankan bahwa interaksi antara sistem sosial dan lingkungan menghasilkan distribusi risiko yang berbeda di antara masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan beroperasi melalui pengaturan ruang ekologis, menentukan siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan dan siapa yang harus menanggung dampak lingkungan (Hudaya dkk., 2023; Muthiah Sadidah, 2013; Yutantri dkk., 2023) .

Bentuk kedua dari hubungan kekuasaan ditemukan dalam produksi pengetahuan bencana. Wawancara menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), media massa, dan pemerintah daerah sebelum mengambil tindakan untuk mengatasi banjir. Pernyataan Dwi Kurniawan Budi bahwa ia selalu mencari informasi dari BMKG sebelum musim banjir menunjukkan bahwa informasi bencana merupakan referensi utama dalam pengambilan keputusan masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pengetahuan formal. Informan mengembangkan berbagai strategi berbasis pengalaman, seperti membangun rak darurat, meninggikan rumah, dan membangun jaringan komunikasi antar warga selama musim hujan. Seperti yang dijelaskan Hery Suhendra , masyarakat sudah memiliki cara praktis untuk mengantisipasi kenaikan permukaan air sebelum bantuan formal tiba. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat juga menghasilkan pengetahuan bencana berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri. (Bigandata dkk., 2023; Nurhamidah dkk., 2018; Yutantri dkk., 2023) .

Bentuk relasi kekuasaan selanjutnya terlihat dalam proses normalisasi risiko

banjir. Pernyataan Uli Auliya Andari bahwa masyarakat terbiasa menghadapi banjir menunjukkan bahwa banjir telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memandang banjir sebagai kondisi luar biasa, melainkan sebagai situasi yang harus diterima dan dihadapi. Penelitian oleh Yulianti dkk. (2022) menjelaskan bahwa pengalaman bencana yang berulang dapat menyebabkan penerimaan sosial terhadap kondisi rentan yang berkelanjutan. Temuan ini diperkuat oleh Rahman dan Hidayat (2021), Putri dkk. (2024), Nugraha dkk. (2022), dan Sari dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa normalisasi risiko sering terjadi di masyarakat yang hidup dalam kondisi ancaman lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Konsep Analisis Hubungan Kekuasaan dalam Krisis Banjir

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam krisis banjir di Kalimantan Barat muncul karena pengelolaan lingkungan, pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana tidak terjadi dalam lingkungan yang netral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menghadapi curah hujan tinggi, luapan sungai, dan banjir pasang surut, tetapi juga menghadapi dampak perubahan penggunaan lahan, pengurangan daerah tangkapan air, dan pembangunan yang dianggap mengabaikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan

banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh berbagai keputusan sosial dan politik yang mengatur bagaimana ruang ekologis dimanfaatkan. (Nugroho, RA, Yuliana, IN, & Wahyuni, 2021; Pratama dkk., 2022) . Dari perspektif Michel Foucault (1980), temuan ini dapat dipahami melalui konsep kekuasaan, yang tidak hanya dipegang oleh negara atau lembaga tertentu, tetapi beroperasi melalui berbagai praktik, kebijakan, peraturan, dan mekanisme sosial yang membentuk kehidupan masyarakat. Berdasarkan data penelitian, masyarakat mengaitkan peningkatan frekuensi banjir dengan perubahan penggunaan lahan, pengurangan luas hutan, pembangunan permukiman, dan aktivitas ekonomi yang mengubah fungsi ekologis wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ruang ekologis di Kalimantan Barat merupakan hasil dari berbagai proses pengaturan yang melibatkan aktor-aktor tertentu dalam menentukan penggunaan sumber daya alam. (Michel Foucault, 1980) .

Hubungan kekuasaan ini muncul karena keputusan mengenai pengelolaan ruang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekologis yang tidak merata. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa pembangunan dan perubahan lingkungan terkait dengan peningkatan risiko banjir yang mereka alami. Namun, masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh konsekuensi ekologis ini. Dalam konteks ini, kekuasaan beroperasi melalui kemampuan aktor-aktor tertentu untuk menentukan arah pembangunan dan penggunaan ruang, sementara kelompok masyarakat di daerah rawan banjir memiliki kapasitas yang lebih terbatas untuk memengaruhi keputusan-keputusan ini.

Selain manajemen spasial, relasi kekuasaan juga muncul melalui produksi pengetahuan bencana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hampir semua informan bergantung pada informasi yang diberikan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), media massa, dan pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan tentang pengelolaan banjir. Informasi mengenai curah hujan, ketinggian air, dan status peringatan banjir berfungsi sebagai dasar bagi masyarakat untuk menentukan langkah-langkah antisipasi. Dalam teori Foucault (1980), situasi ini dapat dijelaskan melalui konsep kekuasaan/pengetahuan, yaitu hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang saling membentuk satu sama lain. Pengetahuan berfungsi tidak hanya sebagai informasi tetapi juga sebagai instrumen

yang mengarahkan tindakan individu dan populasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya tunduk pada pengetahuan formal yang dihasilkan oleh lembaga penanggulangan bencana. Informan menjelaskan bahwa mereka mengembangkan berbagai strategi lokal seperti membangun rak darurat, meninggikan area penyimpanan, menentukan rute evakuasi, dan membangun jaringan komunikasi berbasis masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat juga menghasilkan pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman berulang dengan banjir. Dari perspektif Foucault (1980), situasi ini dapat dipahami melalui konsep pengetahuan yang tertindas, yaitu suatu bentuk pengetahuan lokal yang berkembang di luar sistem pengetahuan dominan. (Michel Foucault, 1980) .

Temuan penting lainnya adalah munculnya normalisasi risiko banjir dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan Uli Auliya Andari bahwa masyarakat telah terbiasa menghadapi banjir menunjukkan bahwa banjir tidak lagi dipandang sebagai situasi luar biasa. Masyarakat telah menyesuaikan aktivitas sosial, ekonomi, dan rumah tangga mereka dengan kemungkinan banjir setiap tahun. Dalam kerangka Foucauldian, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep normalisasi, yaitu proses di mana individu menerima suatu kondisi tertentu sebagai hal yang normal karena kondisi tersebut terus-menerus dialami dalam kehidupan sehari-hari (Foucault, 1977). Normalisasi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari pengalaman berulang yang membentuk bagaimana individu memahami realitas sosial yang mereka hadapi.

Dalam konteks penelitian ini, normalisasi risiko menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu beroperasi melalui paksaan langsung. Kekuasaan beroperasi lebih halus, membentuk bagaimana orang memandang banjir sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Akibatnya, fokus orang sering bergeser dari mempertanyakan penyebab struktural banjir ke mengembangkan strategi bertahan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, orang lebih beradaptasi dengan risiko yang ada daripada kemampuan mereka untuk mengubah kondisi struktural yang menghasilkannya. Namun, teori Foucault tidak memandang masyarakat sepenuhnya pasif. Foucault (1980) menegaskan bahwa di mana ada kekuasaan, selalu ada kemungkinan perlawanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan ini muncul melalui solidaritas sosial, kerja sama timbal balik, dan berbagai praktik adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat ketika menghadapi banjir. Wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat secara kolektif membantu dalam

proses evakuasi, memindahkan barang berharga, menyediakan tempat penampungan sementara, dan membantu pemulihan pasca bencana. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat membangun kapasitas perlindungan mereka sendiri melalui jaringan sosial yang tersedia secara lokal.

Bentuk perlawanan lain terhadap konstruksi peran sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam transformasi peran gender selama banjir. Data penelitian menunjukkan bahwa situasi darurat mendorong terjadinya fleksibilitas dalam pembagian kerja yang dalam kondisi normal cenderung mengikuti pola gender yang normatif. Perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, seperti menyiapkan makanan, mengurus anak, dan memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, tetapi juga terlibat dalam proses evakuasi, penyelamatan anggota keluarga, serta pengambilan keputusan terkait keselamatan keluarga. Sebaliknya, laki-laki tidak hanya menjalankan peran yang berkaitan dengan pekerjaan di luar rumah atau aktivitas penyelamatan, tetapi dalam situasi tertentu turut mengambil alih pekerjaan domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, dan menyediakan kebutuhan keluarga selama dan setelah banjir.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa krisis tidak hanya menghasilkan kerentanan, tetapi juga membuka ruang bagi negosiasi terhadap pembagian peran sosial yang sebelumnya dianggap tetap. Dalam perspektif Foucauldian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk resistensi mikro terhadap normalisasi peran gender. Kekuasaan yang bekerja melalui norma sosial tidak sepenuhnya bersifat menentukan karena selalu memungkinkan munculnya praktik-praktik alternatif yang dinegosiasikan oleh individu dan keluarga sesuai dengan kebutuhan situasional. Dengan demikian, fleksibilitas peran gender selama banjir memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menyesuaikan dan mengubah praktik sosial ketika struktur peran yang berlaku tidak lagi memadai untuk menghadapi kondisi krisis.

Namun demikian, temuan mengenai transformasi peran gender dalam penelitian ini perlu dibaca secara proporsional. Data yang diperoleh belum memungkinkan penelitian untuk menyimpulkan adanya perubahan struktural atau jangka panjang dalam relasi gender di tingkat masyarakat. Perubahan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai fleksibilitas peran yang bersifat situasional dan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan keselamatan serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga selama banjir. Keterbatasan data yang secara khusus mendokumentasikan pengalaman perempuan dan

laki-laki secara komparatif juga menyebabkan analisis gender dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan secara lebih mendalam mengenai perbedaan beban, akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, maupun pengalaman kerentanan berdasarkan gender. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan data gender yang lebih terstruktur diperlukan untuk mengkaji apakah fleksibilitas tersebut berlanjut setelah kondisi bencana berakhir atau justru kembali pada pola pembagian kerja yang normatif.

Secara keseluruhan, analisis Foucauldian terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam krisis banjir di Kalimantan Barat bekerja melalui empat mekanisme utama, yaitu pengelolaan ruang ekologis, produksi pengetahuan bencana, normalisasi risiko, dan pembentukan praktik adaptasi sosial. Keempat mekanisme tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam membentuk kerentanan sekaligus kapasitas masyarakat dalam menghadapi banjir. Pengelolaan ruang ekologis menentukan distribusi risiko, produksi pengetahuan membentuk cara masyarakat memahami dan merespons bencana, normalisasi risiko dapat membuat kondisi berbahaya dipandang sebagai sesuatu yang biasa, sedangkan praktik adaptasi sosial menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan dan merespons keterbatasan yang dihasilkan oleh struktur tersebut. Dengan demikian, krisis banjir di Kalimantan Barat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari faktor alam. Banjir juga merupakan fenomena sosial-politik yang berkaitan dengan bagaimana ruang dikelola, pengetahuan diproduksi dan disebarluaskan, risiko dinormalisasi, serta bagaimana masyarakat membangun strategi adaptasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka Foucauldian, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan atau institusi formal, tetapi juga bekerja melalui praktik sehari-hari, norma sosial, pengetahuan lokal, dan pengaturan ruang. Pada saat yang sama, praktik adaptasi, solidaritas, serta fleksibilitas peran sosial menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menjadi objek dari relasi kekuasaan, melainkan tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi dan resistensi terhadap kondisi yang membentuk kerentanan mereka.

SIMPULAN

Penutup

Studi ini bertujuan untuk menganalisis relasi kekuasaan yang berperan dalam krisis banjir di Kalimantan Barat, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan ekologis masyarakat, dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir di Kalimantan Barat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena hidrometeorologis yang disebabkan oleh curah hujan lebat, luapan sungai, atau banjir pasang surut, melainkan sebagai krisis sosial-ekologis yang dipengaruhi oleh dinamika relasi kekuasaan dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Relasi kekuasaan ini tampak melalui pengaturan ruang ekologis, perubahan penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, produksi pengetahuan bencana, dan manajemen risiko, yang pada akhirnya membentuk tingkat kerentanan masyarakat terhadap banjir.

Studi ini menemukan bahwa bentuk hubungan kekuasaan yang paling dominan beroperasi melalui pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Kebijakan pembangunan, perluasan perkebunan, pembangunan perumahan, dan pengurangan daerah aliran sungai merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan ekologis masyarakat. Dalam kondisi ini, manfaat ekonomi pembangunan cenderung dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara risiko ekologis banjir lebih ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Lebih lanjut, hubungan kekuasaan juga beroperasi melalui produksi pengetahuan bencana yang disebarluaskan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), media massa, dan pemerintah daerah. Pengetahuan ini berfungsi sebagai mekanisme yang memandu tindakan masyarakat dalam mengatasi risiko banjir. Namun, masyarakat bukan hanya objek manajemen risiko; mereka juga menghasilkan pengetahuan lokal melalui pengalaman mereka dengan banjir yang berulang, suatu bentuk adaptasi dan perlawanan terhadap kerentanan mereka.

Analisis menggunakan perspektif Michel Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan beroperasi secara produktif melalui pembentukan pemahaman masyarakat tentang risiko, pengaturan perilaku, dan adaptasi kehidupan sehari-hari terhadap kemungkinan banjir. Proses normalisasi risiko yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banjir telah menjadi bagian yang diterima dalam kehidupan

masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan tidak hanya menghasilkan kerentanan tetapi juga memunculkan berbagai bentuk perlawanan sosial. Solidaritas sosial, kerja sama timbal balik, pengetahuan lokal, dan fleksibilitas peran gender selama keadaan darurat adalah bentuk kapasitas kolektif yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa krisis banjir di Kalimantan Barat merupakan hasil interaksi antara faktor ekologis dan relasi kekuasaan yang beroperasi melalui tata kelola lingkungan, pembangunan, dan produksi pengetahuan. Oleh karena itu, upaya mitigasi banjir tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknis dan tanggap darurat; upaya tersebut juga harus diarahkan pada peningkatan tata kelola lingkungan agar lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko banjir harus mempertimbangkan dimensi kekuasaan dalam pengelolaan spasial, distribusi manfaat pembangunan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai aktor kunci dalam membangun ketahanan sosial-ekologis di Kalimantan Barat.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada pengalaman dan perspektif masyarakat yang terdampak banjir, sebagai kelompok yang secara langsung mengalami konsekuensi krisis sosial-ekologis di Kalimantan Barat. Perspektif aktor lain yang memiliki peran penting dalam tata kelola lingkungan, seperti pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, pengembang perumahan, dan lembaga pengelolaan sumber daya alam, belum dieksplorasi secara mendalam. Padahal, aktor-aktor ini memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang, perubahan penggunaan lahan, dan pengelolaan lingkungan, yang berpotensi memengaruhi tingkat kerentanan banjir. Lebih lanjut, penelitian ini belum mengintegrasikan analisis spasial dan data geospasial tentang perubahan tutupan lahan, sehingga hubungan antara dinamika pembangunan, perubahan lingkungan, dan peningkatan risiko banjir masih dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, termasuk penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis citra satelit, dan melibatkan berbagai aktor yang terlibat dalam tata kelola lingkungan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan

kekuasaan yang membentuk kerentanan ekologis.

Berdasarkan temuan penelitian, upaya pengurangan risiko banjir di Kalimantan Barat tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknis seperti pembangunan drainase, normalisasi sungai, peningkatan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir, atau penguatan sistem peringatan dini. Pemerintah perlu mengembangkan tata kelola lingkungan yang lebih adil dengan memperkuat pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan pembangunan. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Pengetahuan lokal yang dikembangkan melalui pengalaman masyarakat dalam menghadapi banjir juga perlu diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem mitigasi dan adaptasi bencana. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan banjir tidak hanya harus fokus pada pengendalian dampak hidrometeorologi tetapi juga diarahkan pada peningkatan tata kelola lingkungan, distribusi risiko yang lebih adil, dan transformasi hubungan kekuasaan yang telah berkontribusi pada munculnya kerentanan ekologis di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2024). Kajian perbandingan mitigasi kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan akibat banjir rob di Demak. *ERSUD*, 1(1), 47–63.
- Andriyani, I., Wahyuningsih, S., Hoesain, M., & Alfarisy, F. K. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Hulu Melalui Konservasi Sumber Daya Alam sebagai Antisipasi Bencana Kekeringan dan Banjir Sepanjang Tahun di Kabupaten Jember. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 538–544. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.314>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (2026). Banjir melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kalbar. *BPBD Kalbar*.
- Bigandata, Y., Wahyuni, P., & Maharani, Y. N. (2023). Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Pada Bencana Banjir Di Kelurahan Sutojayan Kabupaten Blitar. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 2(1), 57–67. <https://doi.org/10.20961/ijed.v2i1.688>
- Bryant, R. L. (1997). *Third World political ecology*. Routledge.
- Wisanggeni, D. H., Sitorus, J. E., Putra, K. H. P., & Adityawan, M. B. Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Debit Banjir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 9(2), 327–338. <https://doi.org/10.29244/jsil.9.2.327-338>
- Djumaty, B. L., & Hayam Dey, N. P. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Sungai Batu Terhadap Perubahan Iklim Di Desa Kubu Kabupaten Kotawaringin Barat. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(4), 405–416. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i4.2925>

- Eka Wulan Safriani, Somantri, L., Rohmat, D., Setiawan, I., Panjaitan, B. R., & Arifin, A. (2024). Pemodelan Spasial Dalam Mengidentifikasi Tingkat Kerentanan Banjir Di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 11(2), 347–357. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.2.6>
- Ertian, M. H., Akbar, A. A., & Jati, D. R. (2025). Kerawanan Banjir pada Permukiman di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(6), 1359–1369. <https://doi.org/10.14710/jil.23.5.1359-1369>
- Daryanes, F. (2026). Analisis Permasalahan Banjir Dan Strategi Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Indonesian JUournal Environment and Disaster (IJED)*, 5(1).
- Foucault, M. (n.d.). *The Archaeology of Knowledge*.
- Hudaya, A., Qothrunnada, L., Hidayatullah, A. F., & Taufiq, T. T. (2023). Social and ecological impacts after normalization of the Banjir Kanal Barat River for communities around North Semarang. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 18(1), 82–91. <https://doi.org/10.20473/jsd.v18i1.2023.82-91>
- Lizar, C. A., Satriawan, H., & Azizah, C. (2024). Analisis Wilayah Kerentanan Bencana Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kota Lhokseumawe. *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil*, 14(1), 53–67. <https://doi.org/10.29103/tj.v14i1.1004>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. SAGE Publications.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977* (Colin Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhyi, H. A., Nurmandi, A., & Suryanto, M. A. (2017). Pentahelix model in public policy innovation: A study on disaster management in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(1), 116. <https://doi.org/10.22146/jsp.28900>
- Mujib, M. F., Fatmawati, N., & Nur, D. M. M. (2025). Mitigasi Bencana Banjir di Karanganyar Demak: Kajian Sosial dan Edukatif dalam Pendidikan IPS. *Infomatek*, 27(2), 203–214. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v27i2.26046>
- Muthiah Sadidah, D. K. (2023). Modeling The Socio-Hydrological Dynamics between Flood Hazard and Society In Citarum Watershed, Indonesia Graduate. *Proceedings of 2023 Annual Conference, Japan Society of Hydrology and Water Resources/Japanese Association of Hydrological Sciences*, 1–2.
- Nisa Rizqi Ramadhanty, Chatarina Muryani, G. A. T. (2022). Analisis Tingkat Kerentanan Masyarakat Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 2021. *International Journal Environment and Disaster*, 1(1).
- Nurhamidah, Junaidi, A., & Kurniawan, M. (2018). Tinjauan Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Limpasan Permukaan. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 14(2), 131–138.

- Ocktaviani, S. N., Badrun, B., & Cangara, S. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Debit Banjir Pada Wilayah Hilir DAS Saddang Kabupaten Pinrang. *Jurnal Penelitian Teknik Sipil Konsolidasi*, 3(2), 234–242. <https://doi.org/10.56326/jptsk.v3i2.4290>
- Prasetyo, K., Prayoga, G., Azhar, A. R., Permadi, T., & Pratiwi, D. (2021). Kerentanan DAS Kali Bekasi ditinjau dari aspek sosial-ekonomi-kelembagaan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 4(3), 576–591. <https://doi.org/10.36813/jplb.4.3.576-591>
- Pratama, D. N., Amanda, R. B., & Anitasyah, S. (2022). Kajian Struktural Fungsional: Fenomena Banjir sebagai Akibat dari Tidak Selarasnya Fungsi dan Sistem di Indonesia. *Sosietas*, 12(1), 65–74. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48072>
- Paramitha, P. P., Tambunan, R. P., & Indra, T. L. (2020). Kajian Pengurangan Risiko Bencana Banjir di DAS Ciliwung. *IJEEM - Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 5(2), 100–124. <https://doi.org/10.21009/ijeem.052.01>
- Putri, F. U., Arimas, N. W. E., Peanasari, A. R. I., & Yuliaty, F. (2025). Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menjaga Keberlanjutan Hutan Adat Kalimantan. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 6(3), 251–257. <https://doi.org/10.32897/sobat.2024.6.1.4189>
- Rabsanjani, G. R., Akbar, A. A., & Herawati, H. (2022). Valuasi Dampak Banjir Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 65–75. <https://doi.org/10.14710/jil.20.1.65-75>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Raudy Al Fansuri, Putri Yuli Utami, I. (2026). Pengelompokan Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kalimantan Barat Menggunakan Algoritma DBSCAN. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 6(April).
- Rizki Oktian, Roby Hambali, dan B. Di. A. S. (2025). Studi Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Akibat Pembangunan Kawasan Perumahan Terhadap Limpasan Permukaan di Kota Palangkaraya. *Jurnal Teknis Sumber Daya Air*, 5(2).
- S.B. Soeryamassoeka, Danang Gunarto, Umar, Fiqih Rahmanto, R. N. (2023). Strategi Pengendalian Banjir Terpadu Di Sub Das Melawi Kalimantan Barat. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 4(November), 2. <https://doi.org/10.33541/cen.v4i2.5233>
- Satyaningrum, R., Mubaligh, A., & Fitriani, L. (2024). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kalimantan Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(3), 328–345. <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i3.8382>
- Sianipar, K. D., & Lingga, A. (2025). Hutan Adat Sungai Utik: Inspirasi Ekowisata Berkelanjutan dari Jantung Kalimantan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(2), 61–66. <https://doi.org/10.70716/emis.v3i2.315>
- Stepanus Stepanus, Jasisca Meirany, A. W. (2023). Pemetaan dan perencanaan mitigasi bencana berbasis GIS di Kota Singkawang Kalimantan Barat. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan , PWK , Sipil, Dan Tambang*, 10(1).

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suprianto, A., Yudha Irawan, L., Ratnawati, N., Ririh Windayu, C., & Triningsih, L. (2025). Ketangguhan Sosial-Ekologis Komunitas Pesisir terhadap Banjir: Studi Adaptasi dan Ketahanan di Rowoterate Kabupaten Malang. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 10(2), 158–167. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPIG/article/view/12796>
- Suryawati, S. H., Soetarto, E., Adrianto, L., & Purnomo, A. H. (2011). Social-Ecological Vulnerability of Community In Segara Anakan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (JPSL)*, 1(2), 62–72.
- Wijaya, Y. T., & Halim, I. T. (2022). Measuring and Profiling Social Vulnerability to Natural Disaster in Indonesia in 2019. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 19(1), 183–194. <https://doi.org/10.20956/j.v19i1.21686>
- Yanti, R. M. K., Ghozali, A., & Dewanti, A. N. (2022). Dampak Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Peningkatan Debit Banjir Pada Das Ampal Kota Balikpapan. *Reka Ruang*, 5(2), 117–126. <https://journal.itny.ac.id/index.php/rekaruang/article/view/2344%0Ahttps://journal.itny.ac.id/index.php/rekaruang/article/view/2344/1599>
- Yutantri, V., Suryandari, R. Y., Putri, M. N., & Widyawati, L. F. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Perumahan Total Persada Raya Kota Tangerang. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 199–214. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.199-214>